



**IMPLEMENTASI PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI  
BARENLITBANGDA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial ( S.Sos)  
Pada program studi Ilmu Politik S1**

**Oleh:**

**RANGGA SEPTA KESUMA**

**3312414047**

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2020**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

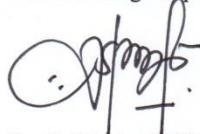
Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian

Skripsi Fakultas Ilmu Sosial pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Maret 2020

Pembimbing Skripsi

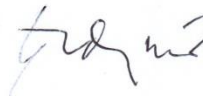


Dr. Sos Puji Lestari S.Pd., M.Si.

NIP. 197707152001122008

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si.

NIP. 196211201987021001

**PENGESAHAN KELULUSAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 6 April 2020

Penguji I

Andi Suhardiyanto S.Pd., M.Si  
197610112006041002

Penguji II

Nugraheni Arumsari S.Sos., M.I.Kom  
198502072014042001

Penguji III

Dr. Sos. Puji Lestari S.Pd., M.Si  
197707152001122008

Mengetahui,

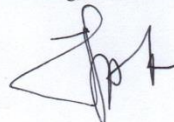
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Dr. Moh. Solchatul Mustofa, M.A.  
NIP. 196308021988031001

#### PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat atau temuan dari orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah penulisan.

Semarang, 14 Februari 2020



Rangga Septa Kesuma

NIM. 3312414047

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

- ❖ Kamu tidak akan pernah meraih sesuatu didalam hidup tanpa pengorbanan, meski itu kecil.

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tua saya, Bapak Suwondo SE , MH dan Ibu Sasnar Damanik, serta adik saya Anjela dan Jesicha yang selalu memberikan kasih, sayang dan dukungan penuh, motivasi dan pengorbanan serta tidak hentinya memberikan semangat dan doa.
- ❖ Pembimbing saya Ibu Puji Lestari S,Pd.,M,Si. yang selalu sabar dalam membimbing saya untuk mengerjakan skripsi.
- ❖ Teman-teman seperjuangan Ilmu Politik 2014 yang telah menjadi penyemangat bagi saya.
- ❖ Teman saya Lusi , Windi dan Okta yang menemani saya selama mengerjakan skripsi
- ❖ Teman-teman SFF yang memberi semangat untuk saya menyelesaikan skripsi
- ❖ Almamater UNNES

## SARI

**Kesuma, Ranga Septa.**2019. *Implementasi program Penelitian dan Pengembangan di BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang tahun 2018*. Skripsi. Program Studi Ilmu Politik. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.Fakultas Ilmu Sosial.Universitas Negeri Semarang.Pembimbing Puji Lestari S.Pd.,M.Si

**Kata Kunci :Implementasi, Program, SKPD, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BARENLITBANGDA), Masyarakat.**

Implementasi program Penelitian dan Pengembangan di BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan daerah dan masyarakat Kabupaten Semarang. Implementasi program pembangunan dan pengembangan tentunya seturut dengan target yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat. Rumusan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana proses Implementasi program bidang Penelitian dan Pengembangan di Barenlitbangda Kabupaten Semarang (2) Apa saja kendala yang ditemui pada saat implementasi dilakukan

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang meliputi teknik reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Proses implementasi diawali dengan koordniasi antar bidang didalam Barenlitbangda untuk selanjutnya akan dilakukan Musrenbang di tingkat kecamatan dan desa , lalu dijalankan dengan menggandeng seluruh lapisan masyarakat maupun pihak swasta apabila diperlukan. (2) Meninjau hambatan menurut Edwards II hambatan yang ditemui selama masa implementasi adalah Komunikasi,SDM , SOP dan Disposisi dari para pelaku impelementasi.

Saran yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: Barenlitbangda dapat mengkaji kembali bagaimana sistem koordinasi yang cocok dan efektif digunakan , Barenlitbangda mengkaji kembali untuk permasalahan petugas ahli ataupun penambahan SDM pada bidang yang memerlukan , membenahi kembali komitmen didalam setiap staf dan karyawan Baarenlitbangda.

## ABSTRACT

Kesuma, Rangga Septa. 2019. Implementation of Research and Development program in BARENLITBANGDA Semarang Regency in 2018. Thesis. Political Science Study Program. Department of Politics and Citizenship. Faculty of Social Science. Semarang State University. Mentor I Puji Lestari S.Pd., M.Sc

**Keywords: Implementation, Program, SKPD, Regional Planning and Development Planning Agency (BARENLITBANGDA), Community.**

The implementation of the BARENLITBANGDA Research and Development program in Semarang Regency aims to develop and development Semarang Regency areas and society.

The implementation of development and development programs is of course in accordance with the target to be achieved by the central government. This research formula is: (1) What is the process of implementing the program in the Semarang Regency Barenlitbangda (2) What are the obstacles encountered during the implementation

The research method used is qualitative. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques using interview, observation, and documentation. This research uses qualitative analysis which includes data reduction techniques, data presentation and data conclusions

The results of the study show that: (1) The implementation process begins with coordination between fields within the Barenlitbangda to be further carried out by the Musrenbang at the sub-district and village levels, then carried out in cooperation with all levels of society and the private sector if necessary. (2) Reviewing obstacles according to Edwards II, the obstacles encountered during the implementation period were Communication, HR, SOP and Disposition from the implementers.

Suggestions proposed by researchers are as follows: Barenlitbangda can review how a suitable and effective coordination system is used, Barenlitbangda reviews the problems of expert staff or the addition of human resources in areas that require, re-fixing commitments within each staff and employees of Baarenlitbangda.

## **PRAKATA**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah senantiasa memberikan berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Program Penelitian dan Pengembangan di BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang tahun 2018”. Penulis menyadari, dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dengan hormat penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Solehatul Mustofa, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Tijan, M,Si., selaku Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
4. Dr.Sos Puji Lestari S,Pd. M,Si selaku dosen pembimbing.
5. Segenap dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
6. Ir. Anang Dwinanta,MM selaku kepala BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang yang telah memberikan banyak bantuan akses kepada penulis.
7. Suyana,SH,M,Si selaku kepala bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang yang telah memberikan banyak bantuan informasi kepada penulis.



8. Ir. Febriana Kusuma A, M.M selaku kepala bidang Perencanaan Ekonomi dan Praswil BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang yang telah memberikan banyak bantuan informasi kepada penulis.
9. Sidiq Sudibyo S.T, M.T. selaku kepala bidang Perencanaan Pembangunan Daerah BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang yang telah memberikan banyak bantuan informasi kepada penulis.
10. Ir. Sukanto selaku kepala bidang Penelitian dan Pengembangan BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang yang telah memberikan banyak bantuan informasi kepada penulis
11. Tri Mujiyati, SE selaku Sub Bagian Perencanaan BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang yang telah memberikan banyak bantuan informasi kepada penulis
12. Mama dan Papa yang sangat penulis cintai.
13. Keluarga Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, khususnya teman-teman Ilmu Politik 2015.
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Kritik dan saran selalu penulis harapkan dari pembaca untuk perbaikan penulisan selanjutnya.

Semarang, Februari 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
SARI .....	vi
ABSTRACT.....	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Batasan Istilah.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A.Landasan Teori.....	11

1.Implementasi.....	11
2.Program.....	15
3. Barenlitbangda .....	19
4. Penelitian Relevan .....	22
5. Kerangka Berpikir.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
1. Latar Penelitian .....	27
2. Fokus Penelitian.....	28
3.Sumber Data .....	29
4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data .....	30
5. Uji Validitas Data .....	32
6. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Barenlitbangda Kabupaten Semarang .....	36
B.Hasil Penelitian .....	41
C.Pembahasan.....	53
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR SINGKATAN

<b>APBD</b>	<b>: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</b>
<b>DPRD</b>	<b>: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>
<b>DPA</b>	<b>: Dokumen Pelaksanaan Anggaran</b>
<b>Musrenbang</b>	<b>: Musyawarah Rencana Pembangunan</b>
<b>RKA</b>	<b>: Rencana Kerja dan Anggaran</b>
<b>RKPD</b>	<b>: Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>
<b>RPJMD</b>	<b>: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah</b>
<b>RPJP</b>	<b>: Rencana Pembangunan Jangka Panjang</b>
<b>RTRW</b>	<b>: Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional</b>
<b>SKPD</b>	<b>: Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel Rencana Program Barenlitbangda Tahun 2018.....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel Realisasi Program Barenlitbangda Tahun 2018.....</b>	<b>58</b>

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir .....	26
Bagan 3.1 Susunan organisasi Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang .....	40
Bagan 3.2 Alur Kerja .....	48

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Foto Kegiatan Penelitian .....	75
Lampiran 2 : Perincian Tugas Bidang.....	78

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini, Indonesia sedang bergerak dalam pembangunan besar-besaran yang di pimpin oleh Pemerintah yang menjabat. Pembangunan di segala sektor akan terus digerakan oleh pemerintah guna memperbaiki struktur dan tatanan masyarakat agar menjadi semakin baik serta dapat bersaing dengan negara berkembang lainnya. Pembangunan di Indonesia digerakan bukan hanya dari pusat saja namun pondasi - pondasi pembangunan juga dirintis dari skala daerah. Daerah juga merupakan sektor penting dalam menggapai tujuan keberhasilan pembangunan nasional. Dengan kemajuan dan perkembangan di skala daerah tentu akan membantu sektor diatasnya untuk lebih mudah dalam melangkah dan menyusun rencana-rencana kerja selanjutnya, selain itu daerah yang maju juga akan memberikan dorongan finansial yang baik bagi negara karena daerah yang mandiri dan maju adalah penentu langkah perekonomian yang signifikan bagi suatu negara berkembang.

Pemerintah merupakan pihak yang paling penting dan berperan sebagai penggerak dalam pembangunan yaitu melalui perencanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan disetiap daerah baik di pusat maupun di daerah pedesaan dimana pemerintah saat ini memfokuskan pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah untuk memacu daerah pembangunan yang masih tertinggal.



Berbicara mengenai pembangunan di skala daerah pasti akan saling terkait dengan otonomi daerah sebagai penerapan dari asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan untuk menjawab tuntutan dari masyarakat. Hakikatnya otonomi daerah adalah pembagian kekuasaan secara vertikal, yang dimana dalam konteks ini kekuasaan terbagi menjadi pemerintah pusat sebagai pihak satu dan pemerintah daerah di pihak lainnya dengan catatan bahwa kedua pihak tersebut masih dalam satu kerangka sisi yang sama yaitu dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kebijakan desentralisasi yang tertuang di UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menjadi langkah awal pergantian pemerintahan yang dulunya bersifat terpusat menjadi terdesentralisasi meliputi antara lain penyerahan kewenangan pusat ke daerah dan perubahan perimbangan antara pusat dan daerah. Dengan adanya desentralisasi diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan menjadi praktis, sederhana, mudah, dan cepat.

Adanya kebijakan ini maka pemerintah memerlukan lembaga yang kuat dan berkualitas untuk fokus dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Disinilah pemerintah meletakkan suatu badan pembangunan daerah (Bappeda) yang sekarang telah beralih nama menjadi Barenlitbangda yaitu Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Perubahan nama ini sejalan dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penamaan, Singkatan, dan Akronim Instansi Pemerintah, maka sudah saatnya setiap OPD baru memberikan nama singkatan atau akronim dengan memerhatikan kemudahan dalam penyebutannya sehingga pada penulisan dan pengelolaan tata naskah dinas tidak menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Artinya, pembentukan singkatan dan akronim tidak menimbulkan tumpang tindih dengan OPD lain.

Barenlitbangda sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bertanggung jawab dalam penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pada tingkat daerah agar mewujudkan pelaksanaan program yang lebih terintegritas, sinkron dan sinergis antar daerah , antar waktu, dan antar fungsi pemerintahan.

Implementasi program-program Barenlitbangda haruslah baik dan sesuai rencana. Agar penetapan rencana dapat sinkron dengan implementasi di lapangan dibutuhkan kejelasan program kerja serta SDM yang baik dalam setiap bidang Barenlitbangda agar tanggung jawab yang diembankan mampu dilakukan dengan baik dan benar. Kemudian seperti layaknya semua program yang dijalankan pemerintah maka akan ditunggu juga laporan keberhasilan dan evaluasi. Sehubungan dengan itu juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah maka setiap program yang dijalankan akan dipantau oleh penanggung jawab agar semua yang dituju dari

program yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Penelitian yang relevan dengan judul dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Mega (2016) yang berjudul Peran Bappeda dalam Perencanaan pembangunan Kabupaten Bantul. Dalam hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Bappeda selaku badan perpanjangan dari pemerintah pusat sangat baik dan bijak dalam melakukan tugasnya. Bappeda tidak memutuskan secara sepihak masalah perencanaan pembangunan tetapi mengajak serta masyarakat dan meminta masukan dari segala institusi yang terkait. Banyak faktor pendorong dan penghambat dalam proses pembangunan mulai dari Regulasi, Respon, serta kestabilan SKPD yang kurang menyeluruh.

Kemudian ada pula penelitian serupa yang dilakukan oleh Nabila Zatadini (2018) dengan judul peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peningkatan & Percepatan Pembangunan di Kabupaten Lampung Utara. Dalam penelitian tersebut peneliti bertujuan untuk mendapatkan data mengenai program apa yang dilakukan instansi terkait untuk membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara, kemudian peneliti juga mencari faktor penghambat serta pendorong guna memberikan hasil penelitian terbaik. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yudiantno dengan judul Peranan Bappeda dalam pembangunan Daerah di Kabupaten Jeneponto. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah Bappeda mampu menjalankan peran dengan baik sesuai Undang-undang no 12 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan meliputi 4 hal yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, monitoring dan pelaksanaan rencana. Penelitian lain yang juga mendukung penelitian ini adalah jurnal penelitian yang dilakukan oleh Soengkono Sidik dengan judul Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian tersebut membahas bagaimana proses pembuatan Program perencanaan Pembangunan terjadi kemudian beliau juga menyoroti perihal faktor-faktor pendorong dan penghambat serta evaluasi dari implementasi program di Bappeda.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dimuat mengenai pembangunan dan pertanggungjawaban melalui program kerja Barenlitbangda diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **：“Implementasi Program Penelitian dan Pengembangan di Barenlitbangda Kabupaten Semarang Tahun 2018”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi program Penelitian dan Pengembangan di Barenlitbangda Kabupaten Semarang Tahun 2018?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaanprogram Penelitian dan Pengembangan di Barenlitbangda Kabupaten Semarang Tahun 2018?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi program penelitian dan pengembangan di Barenlitbangda Kabupaten Semarang Tahun 2018
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program penelitian dan pengembangan di Barenlitbangda Kabupaten Semarang tahun 2018.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia dan ikut membantu memperkaya wawasan keilmuan dalam bidang Ilmu Politik. Utamanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan

pengetahuan khususnya tentang wawasan mengenai program-program kerja Barenlitbangda khususnya Program Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Semarang tahun 2018.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi penulis**

Sebagai sarana berproses dan menuangkan pemikiran tentang masalah yang diteliti sehingga menambah wawasan akan pengimplementasian sebuah program dalam kelembagaan dapat berjalan dari awal hingga akhir. Serta menjadikan sebuah saran untuk lebih mengetahui seluk beluk kelembagaan di tingkat daerah agar penulis juga dapat menerapkan ilmu yang dipelajari di perkuliahan dengan pekerjaan di lapangan yang sesungguhnya.

### **b. Bagi Prodi Ilmu Politik**

Sebagai kajian bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Politik yang berkaitan dengan kebijakan publik dan dapat memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemajuan dunia pendidikan serta diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi jurusan atau fakultas dalam menambah referensi keilmuan.

### **c. Bagi warga Kabupaten Semarang**

Hasil penelitian dapat menjadi wawasan bagi warga Kabupaten Semarang khususnya dalam hal perencanaan dan penganggaran

pembangunan di Kabupaten Semarang. Dengan semakin mengertinya masyarakat luas akan rencana yang di buat oleh pemerintah maka akan semakin besar peluang keberhasilan pembangunan yang sedang dikerjakan.

## **E. Batasan Istilah**

Penelitian ini terdapat beberapa kalimat istilah yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam judul ini maka perlu diberikan penegasan dan penjelasan yang jelas mengenai istilah-istilah kunci dalam rumusan masalah, dengan begitu diharapkan tidak akan terjadi kesalahan persepsi atau penafsiran dalam membaca sehingga penelitian ini lebih terarah.

### **1. Implementasi**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia , implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Bentuk kata kerjanya adalah mengimplementasikan yang artinya melaksanakan atau menerapkan. Secara garis besarnya implementasi adalah sebuah bentuk aksi nyata dalam menjalankan program atau rencana yang sudah dirancang matang sebelumnya atau dalam hal ini implementasi juga bisa diuraikan sebagai proses mewujudkan dan menerapkan strategi yang telah dibuat kedalam bentuk tindakan yang melalui berbagai macam prosedur, program serta anggaran (Whellan & hunger:1993). Implementasi yang ingin dikupas pada skripsi ini adalah penerapan program dan eksekusi di lapangan perihal program utama

Bidang Penelitian dan Pengembangan di Barenlitbangda yang mengemban tugas pembangunan di Kabupaten Semarang periode program tahun 2018.

## 2. Bidang Penelitian dan Pengembangan Barenlitbangda

Barenlitbangda merupakan sebuah akronim dari Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Sebuah instansi yang dibuat oleh negara untuk memfokuskan segala perencanaan dan pembangunan di daerah. Sesuai dengan Visi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Semarang yaitu "Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas yang didukung sumber daya manusia yang profesional serta hasil pengkajian pengembangan yang akurat" dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Barenlitbangda Kabupaten Semarang mengoptimalkan kapasitas dan kemampuan dalam menyusun perencanaan, melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten Semarang guna mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Semarang. Barenlitbangda dalam penelitian ini akan dipersempit ke satu divisi yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan agar memberikan fokus yang tepat kepada objek penelitian yaitu program Pengembangan dan Penelitian, jadi hanya satu divisi saja yang akan dikupas bagaimana melakukan eksekusi terhadap program yang telah disepakati bersama.

## 3. Program

Program yang dimaksudkan disini adalah sebuah agenda kerja yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki



tujuan utama untuk memenuhi target yang telah ditentukan sebelumnya, atau bisa diuraikan juga sebagai sebuah susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara terarah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Dan selain itu program kerja sendiri juga dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target saat akan melakukan pekerjaan, dan hasilnya akan di evaluasi pada masa akhir kepengurusan.

Dalam agenda pembangunan besar tahun 2018 terdapat program utama dari Barenlitbangda Kabupaten Semarang yang meliputi 5 program / urusan berikut:

1. Keuangan
2. Kesehatan
3. Perumahan rakyat
4. Penelitian dan Pengembangan
5. Perencanaan pembangunan

Untuk penelitian ini peneliti akan lebih spesifik membahas di bidang Penelitian dan Pengembangan. Mengangkat program dan urusan di bidang Penelitian dan pengembangan yang telah disepakati untuk dikerjakan selama tahun 2018.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Implementasi**

###### **a. Pengertian Implementasi**

Untuk lebih mengerti jalanya penelitian ini maka mari kita dalam dulu apa yang dimaksudkan dengan konsep implementasi. Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Untuk mendefinisikan pengertian pelaksanaan di bawah ini diuraikan pendapat dari beberapa ahli sebagai berikut.

- 1) Menurut Prof. H. Tachjan (2006 : 25) Implementasi sebagai kebijakan publik adalah proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan atau disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan Implementasi. Kebijakan evaluasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, yang berarti lebih rendah/alternatif menginterpretasikan.

- 2) Implementasi adalah tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Friedrich).
- 3) Pendapat lain oleh Nurdin Usman (2002:70) Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
- 4) Implementasi itu mencakup “Proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik”. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. (Cleaves ,dalam Wahab 2008:187)
- 5) Kemudian ada definisi menurut Mazmanian dan Sabatier yang mengatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum yang juga berbentuk perintah, keputusan, atau putusan pengadilan. Proses pelaksanaan berlangsung setelah melalui beberapa tahapan seperti tahapan pengesahan undang-undang, dan kemudian output dalam bentuk

pelaksanaan keputusan kebijakan, dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan.

- 6) Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

#### **b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi**

Menurut Edwards (dalam Winarno, 2008:174) implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sebuah penerapan atau implementasi dalam sebuah program dapat berstatus akhir berhasil maupun kurang berhasil. Semua itu tergantung dengan eksekusi yang dilaksanakan di lapangan. Proses eksekusi dilapangan adalah langkah yang menentukan

dalam tingkat keberhasilan suatu program, semua yang dilakukan pada masa proses adalah sebuah indikator apakah itu akan membantu atau malah menghambat keberhasilan program. Berikut akan disajikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sebuah implementasi :

- 1) Komunikasi, dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, alur komunikasi dalam implementasi harus terstruktur dan isi informasi ataupun perintah juga sudah seharusnya jelas tersampaikan.
- 2) Sumber daya, dalam sebuah implementasi sumber daya sangat dibutuhkan guna menunjang keberhasilan program. Sumber daya disini ada 2 macam yaitu sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya anggaran (SDA).
- 3) *Standart operating procedures* (SOP), SOP adalah pedoman yang telah dibuat dan disepakati untuk diikuti oleh setiap implementator. Agar mencegah kerancuan dalam pengerjaan program.
- 4) Disposisi, sikap dan komitmen dari pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi pelaku pelaksanaan program.

## 2. Program

Program yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebuah hasil buah pikiran dari orang-orang dan instansi terkait, atau bisa dibilang juga sebuah kebijakan yang disepakati bersama oleh seluruh anggota kelembagaan terkait. Kebijakan yang berupa butir-butir program inilah yang akan menjadi tugas dari organisasi terkait untuk mengimplementasikan atau menjalankannya di dalam praktek.

Budiardjo (dalam Ali, dkk, 2012:12) menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan.

W.I. Jenkins (dalam Wahab, 2004:14) merumuskan kebijakan sebagai *“aset of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve”* (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Chief J.O. Udoji (dalam Wahab, 2004:15), mendefinisikan kebijakan sebagai *“an sanctioned course of action addresses to a particular problem or*

*group of related problems that affect society at large*” (suatu tindakan bersanksi yang mengarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat).

Dalam sebuah organisasi yang baik pasti akan ditemukan sebuah program. Dimana program tersebut akan menjadi acuan sebuah organisasi untuk dapat menjalankan tugas dan kewajiban mereka selama jangka waktu tertentu. Lamanya sebuah program akan menjadi acuan dipengaruhi dengan keputusan dari organisasi itu sendiri. Terkadang program dibuat untuk hitungan jangka bulan maupun tahun. Oleh karena itu, setiap organisasi baik itu swasta maupun pemerintah hendaknya memiliki program kerja yang terstruktur dengan baik, untuk menunjang kelancaran operasional didalam organisasi tersebut.

Dengan adanya program kerja yang terstruktur dengan baik maka pengendalian dan tujuan yang akan dicapai dalam suatu organisasi dapat berjalan dengan baik. Berikut pengertian program / rencana kerja menurut para ahli :

- a. Menurut Husein Umar (2009:65) “Rencana kerja adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir, apabila rencana telah ditetapkan, maka dokumen mengenai perencanaan yang terkait harus diimplementasikan. Karena perencanaan atau rencana kerja adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa.”

- b. Gunawan Adisaputro (2010:89) “Rencana kerja adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumber daya yang akan digunakan, serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya, dalam rangka mencapai hasil. Rencana digunakan manajemen untuk pedoman pengarahan kegiatan dan juga sebagai titik tolak proses pengendalian.
- c. Menurut M. Nafarin (2009:4) “Rencana kerja adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan”.

Sebuah program kerja tidak bisa muncul begitu saja disebuah organisasi ataupun institusi pemerinahan. Sebuah program kerja diciptakan oleh tim kerja / perorangan yang disepakati bersama untuk jadi acuan. Program kerja / rencana kerja memiliki beberapa tahapan dalam penyusunanya. Beberapa tahapan itu akan saya sebutkan secara ringkas dibawah :

- 1) Analisis, Melakukan analisa dan mendiskusikan bersama terhadap hal-hal yang dianggap penting, sehingga perlu diutamakan



dalam membuat program-program kerja yang nantinya akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi.

2) Ide dasar, Menentukan ide dasar untuk program kerja yang akan disusun, dalam mendiskusikan maupun merumuskan ide untuk program kerja harus sesuai dengan apa yang ditemukan dalam diskusi dan berhubungan dengan persoalan yang ditemukan.

3) Tujuan, Merupakan tujuan yang akan di wujudkan melalui program kerja yang di susun. Tujuan ini harus sesuai dengan ide dasar yang ditentukan dan harus realistis sesuai dengan persoalan yang dihadapi dan harus dipecahkan.

4) Subjek sasaran, Maksudnya menentukan subyek yang menjadi sasaran dari program kerja yang dirancang. Dalam memilih subyek yang perlu diperhatikan yaitu kemampuan yang dimilikinya supaya program kerja yang di susun dapat terlaksana dengan baik dan efektif.

5) Ukuran keberhasilan, Merupakan indikator yang nantinya menjadi penilaian apa program kerja telah berhasil atau belum. Dalam membuatnya harus dicantumkan cara memperoleh indikator tersebut, misalnya dengan cara kuesioner, pengamatan, wawancara, dll.

6) Tim pelaksana, Penting sekali menentukan tim pelaksanaan dalam menjalankan program kerja, ketika menentukan tim

pelaksanaan harus memperhitungkan secara tepat tenaga anggota yang ada pada organisasi. Dengan menentukan tim pelaksana maka organisasi akan terhindar dari penumpukan peran atau tugas pada anggota tertentu dan setiap tim dapat fokus terhadap tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Dalam program yang dikerjakan oleh bidang Penelitian dan Pengembangan terdapat beberapa urusan dan kegiatan yang berkenaan dengan agenda besar pembangunan pusat. Fokus kerja dari program penelitian dan pengembangan adalah meninjau atau bahkan memunculkan sebuah gagasan mengenai kesinambungan dalam pembangunan di Kabupaten Semarang. Pada urusan tersebut peneliti akan lebih mengembangkan pembahasan agar dapat menjelaskan dengan rinci hasil dari penelitian yang dilakukan.

### **3. Barenlitbangda**

#### **a. Pengertian Barenlitbangda**

Barenlitbangda sendiri adalah sebuah akronim dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Dibentuk pada tahun 1980 melalui Keputusan Presiden nomor 27 tahun 1980. Barenlitbangda memiliki badan atau tupoksi susunan dan struktur organisasi didalamnya. Diantaranya adalah tupoksi kepala badan, tupoksi sekretariat, tupoksi bidang ekonomi, bidang fisik dan prasarana, bidang sosial dan budaya, dan bidang penelitian pengembangan pendapatan dan pelaporan, lalu bidang

penanaman modal. Tugas Brenlitbangda sendiri adalah tidak jauh dari penjabaran akronimnya dimana akan berkaitan dengan perencanaan, penelitian dan pembangunan suatu daerah. Barenlitbangda dalam suatu daerah tersusun atas:

- 1) Kepala
- 2) Sekertaris
- 3) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial
- 4) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Praswil
- 5) Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- 6) Bidang Penelitian dan Pengembangan
- 7) Staf dan Pegawai Instansi

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencanaan pembangunan penelitian pengembangan daerah, Barenlitbangda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJM Daerah kabupaten/kota dan memperhatikan aspirasi dan kondisi objektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**VISI:**

"Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas yang didukung sumberdaya manusia yang profesional serta hasil pengkajian pengembangan yang akurat".

**MISI:**

1. Menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.
2. Menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan yang akurat.
3. Melaksanakan evaluasi rencana pembangunan daerah yang akuntabel.
4. Melaksanakan pengkajian pengembangan potensi daerah secara analitis.
5. Melaksanakan koordinasi perencanaan secara terpadu.
6. Melaksanakan penatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang akuntabel.

**b. Tujuan Barenlitbangda**

Barenlitbangda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu :

- 1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara Pusat dan Daerah.
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## **B. Penelitian yang Relevan**

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang terkait. Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Kt. Sudiarsa. 2012. Analisis program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng mengenai pengukuran *Value for Money*. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa secara teoritis implementasi program ekonomi dalam kurun waktu 2009-2011 tidak menunjukkan kestabilan ekonomi yang baik. Keadaan yang terjadi berdasarkan sudut pandang *value for money* adalah keadaan siklus tidak ekonomis sampai ekonomis dimana itu ditempuh dari jarak pengukuran 3 tahun.
2. Rahardian, TA. 2012. Peran Bappeda dan Partisipasi masyarakat dalam Implementasi Pembagunan Sanitasi di Desa Jambu Kabupaten Semarang. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian ini dilakukan meliputi sebuah RW di Desa Jambu Kecamatan Jambu. Berjumlah sekitar 100m<sup>2</sup> saluran irigiasi di monitoring pembangunanya. Bappeda ambil andil sedari persiapan Musrenbang, pelaksanaan Musrenbang, Sosialisasi hingga Pelaksanaan Pembangunan. Dari sekian banyak kegiatan persiapan pembangunan sanitasi hanya sedikit saja warga masyarakat yang tergerak untuk bekerja sama berkesinambungan dalam perencaan agenda perbaikan sanitasi di Desa

tersebut. Padahal musrenbang adalah kunci dimana semua kegiatan pembangunan nanti akan dikerjakan dari awal hingga selesai.

3. Yudiantno B. 2012. Peranan Bappeda dalam pembangunan Daerah di Kabupaten Jeneponto. Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah Bappeda mampu menjalankan peran dengan baik sesuai Undang-undang no 12 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dengan meliputi 4 hal yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, monitoring dan pelaksanaan rencana.
4. Muhamad CG. 2013. Peranan Bappeda dalam pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Fisip Unmul Kalimantan Barat. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah peranan Bappeda yang sangat signifikan dalam proses pembangunan Kutai Timur. Secara fungsional berperan aktif secara perencana, pengkoordinasi serta pengendali pelaksana pembangunan di daerah. Bappeda sebagai lembaga perencanaan daerah sesuai dengan tugas pokoknya lebih banyak berfungsi eksternal ketimbang internal. Khususnya sebagai koordinator pengelolaan pembangunan baik antar instansi antar pemerintahan maupun pemerintahan dengan swasta/masyarakat.
5. Nugraha EP. 2017. Peranan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Skripsi Fisip Universitas Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappeda telah melakukan tugasnya dengan baik pada fungsi penyusunan REPALITA dan

APBD. Bappeda juga sangat baik dalam melakukan fungsi monitoring sebanyak empat kali dalam mengevaluasi hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh SKPD terkait.

6. Mega. 2016. Peran Bappeda dalam Perencanaan pembangunan Kabupaten Bantul. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappeda selaku badan perpanjangan dari pemerintah pusat sangat baik dan bijak dalam melakukan tugasnya. Bappeda tidak memutuskan secara sepihak masalah perencanaan pembangunan tetapi mengajak serta masyarakat dan meminta masukan dari segala institusi yang terkait. Banyak faktor pendorong dan penghambat dalam proses pembangunan mulai dari Regulasi, Respon, kestabilan SKPD yang kurang menyeluruh.

### **C. Kerangka Berpikir**

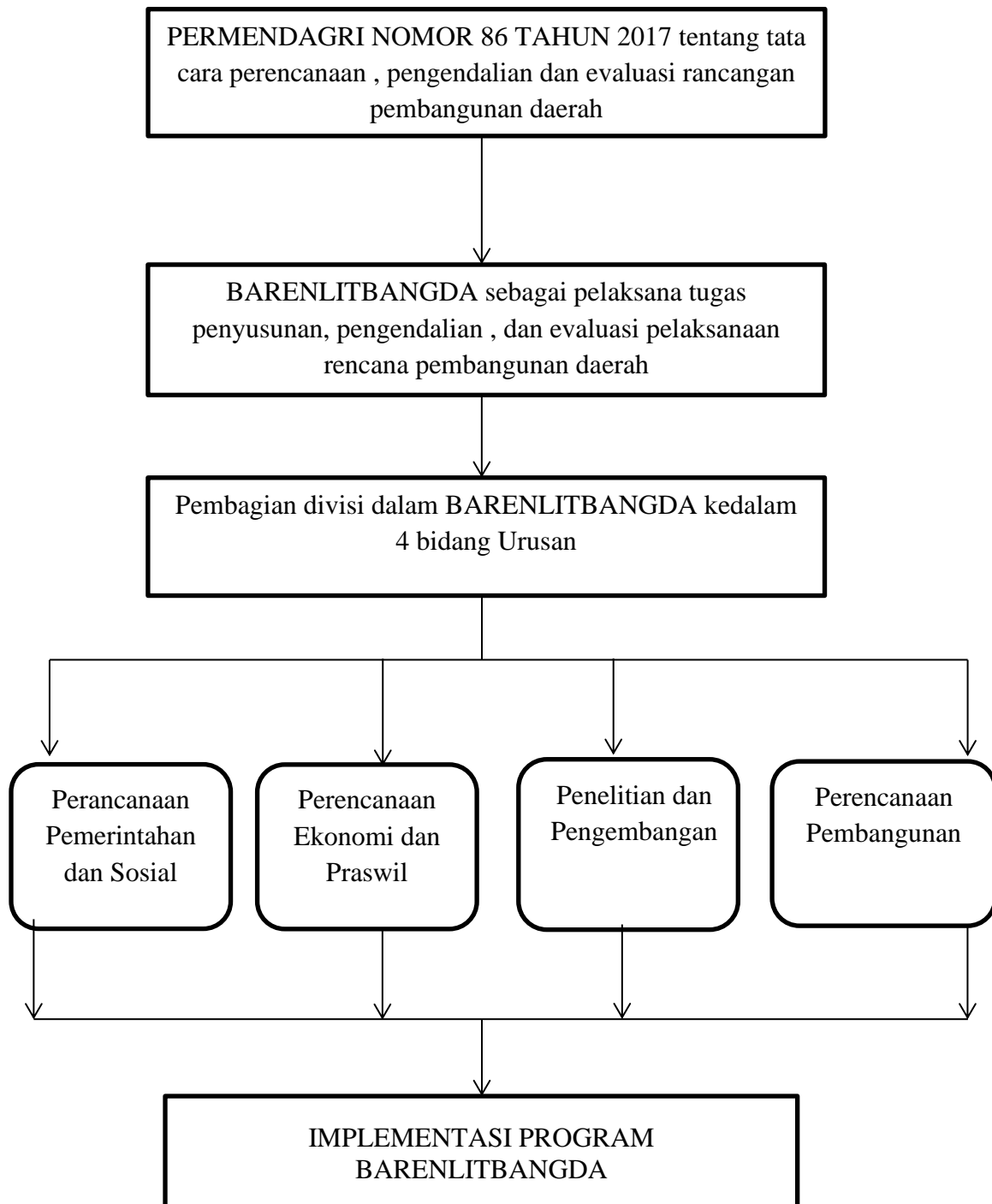
Pemerintahan modern didasarkan atas prinsip spesialisasi atau pembagian kerja. Jabatan-jabatan diuraikan dalam tugas-tugas berulang satu persatu dan dipercayakan kepada individu-individu baik bekerja dalam bagian yang sama maupun yang bekerja dalam bagian-bagian pemerintahan yang berlainan. Akan tetapi hanya dengan penerapan spesialisasi saja tidak selalu memungkinkan suatu organisasi mencapai hasil yang diinginkan. Oleh karena jabatan-jabatan di Barenlitbangda dikhususkan dan dibagikan diantara unit-unit maka koordinasi adalah suatu hal yang sangat perlu dan penting. Dalam implementasi program dari Barenlitbangda, adalah sebuah kewajiban bagi seluruh sub bidang dalam

Barenlitbangda untuk menyelesaikanya. Dalam Barenlitbangda sendiri mereka membagi diri kedalam beberapa bidang menurut spesifikasi kerja. Adapun bidang-bidang tersebut akan bertanggung jawab atas segala tugas/program kerja yang telah diembankan dan akan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Barenlitbangda dan berkewajiban melaporkan SPJ ( Surat Pertanggung Jawaban) kepada Sekretaris Barenlitbangda.

Dalam penelitian ini peneliti akan lebih menyoroti bagaimana implementasi program-program kerja yang telah disusun oleh Barenlitbangda. Apakah program tersebut dapat dilaksanakan dengan lancar atau akan menjumpai hal-hal yang mendukung maupun menghambat. Penelitian yang dilakukan mendalam pada bidang Litbang akan dilakukan dengan menggali informasi verbal dan tertulis pada LPJ ( Laporan Pertanggung Jawaban). Melalui laporan pertanggungjawaban tersebut peneliti akan mencari lebih dalam mengenai peran Barenlitbangda Kabupaten Semarang dalam mengimplementasikan program kerja Penelitian dan Pengembangan yang dibuatnya di tahun 2018.



Berikut adalah kerangka berpikir penelitian ini :



Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Latar penelitian**

Penetapan lokasi penelitian sangatlah penting untuk mempertanggung jawabkan data yang diperoleh dan memperjelas lokasi serta sasaran dalam meneliti. Sebagai objek material peran lokasi tampak dalam kaitannya dengan sumber informasi terhadap objek secara keseluruhan. Metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Tipe penelitian ini adalah deskriptif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran peneliti laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2007:11).

Penelitian kualitatif adalah sebuah alat untuk memaparkan dan memahami makna yang berasal dari individu dan kelompok mengenai masalah sosial atau masalah individu (Creswell, 2014:352). Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang sudah muncul; yaitu dengan mengumpulkan data menurut *setting* partisipan; menganalisis data secara induktif, mengelola data dari spesifik menjadi tema umum, dan membuat penafsiran mengenai makna di balik data.

Penelitian ini sendiri mengambil lokasi di Barenlitbangda Kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Dalam penelitian

kualitatif data yang diperoleh dari penelitian berupa kata-kata yang mencakup catatan-catatan, laporan dan gambar, dan buku yang didapat dari Lembaga yang terkait.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah implementasi program bidang Penelitian dan Pengembangan di Barenlitbangda Kabupaten Semarang. Penentuan fokus ini bertujuan agar penelitian ini dapat terarah dan mempunyai cakupan yang jelas sesuai dengan judul penelitian. Dengan adanya fokus penelitian tersebut maka yang dijadikan pegangan dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan / implementasi dari program – program yang telah ditetapkan dan disetujui oleh segenap anggota Barenlitbangda dan institusi terkait. Bagaimana program tersebut dapat terbagi kedalam sub bidang dan bagaimana eksekusi yang dilakukan oleh setiap bidang yang telah ditunjuk.
2. Membandingkan data yang ada dengan LKPJ tahun terkait guna melihat bagaimana program-program tersebut berjalan. Penelitian ini juga pasti akan mengaitkan bagaimana proses perjalanan implementasi program terselesaikan dari faktor pendukung hingga faktor penghambat.

### C. Sumber Data

Menurut Lofland (1984:47) yang dikutip Moleong (2007:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah *kata-kata*, dan *tindakan*, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data penelitian adalah darimana diperoleh, diambil, dan dikumpulkannya data. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yaitu informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto, 2010:22). Informan memberikan informasi tentang bagaimana pelaksanaan / implementasi program dari Barenlitbangda Kabupaten Semarang. Informan tersebut meliputi:

- a) Kepala Barenlitbangda
- b) Bidang perencanaan pemerintahan dan sosial
- c) Bidang perencanaan ekonomi dan prasarana wilayah
- d) Bidang perencanaan pembangunan daerah
- e) Bidang penelitian dan pengembangan

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang menjadi penunjang dalam penelitian ini. Studi kepustakaan

ini terdiri dari beberapa naskah data. Data sekunder adalah sumber data tambahan yang melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai kajian yang sebelumnya telah ada dan diperkuat melalui buku, jurnal dan skripsi yang membahas hal yang hampir serupa. Sumber data sekunder dalam penelitian ini didapat dari dokumen atau arsip yang dikeluarkan oleh Barenlitbangda Kabupaten Semarang yang berkaitan dengan implementasi program Barenlitbangda itu sendiri. Analisis dokumen menjadi sesuatu yang sangat penting untuk melengkapi hasil penelitian di lapangan.

#### **D. Alat dan Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data akan sangat penting dilakukan. Ada bermacam-macam teknik pengumpulan data diantaranya adalah sebagai berikut :

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami (Herdiansyah, 2013). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Menurut Sugiyono (2009:138), wawancara dapat dilakukan secara terstruktur

maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara terstruktur adalah sebuah proses pengumpulan data yang sistematis, berpedoman dan telah disiapkan segalanya untuk menyempurnakan sebuah proses wawancara. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah kebalikannya dimana proses penggalan data dilakukan dengan bebas dan sedikit lebih santai, pada model wawancara tidak terstruktur peneliti biasanya akan banyak mendengar dari informan agar lebih tahu mengenai pembahasan dari sudut pandang responden. Berikut ini adalah narasumber yang akan diwawancara:

- a. Kepala Barenlitbangda,
- b. Sekretaris dan kesekretariatan,
- c. Kepala dan anggota sub bidang di Barenlitbangda serta
- d. Staf dan Pegawai Barenlitbangda Kabupaten Semarang.

## **2. Observasi**

Observasi adalah satu dari banyak macam teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh kebanyakan peneliti. observasi adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung lokasi penelitian untuk melihat aktivitas dan kegiatan apa saja yang terjadi di lokasi. Menurut Adler dan Adler (2009:523), semua penelitian dunia sosial pada dasarnya menggunakan teknik observasi. Faktor terpenting dalam teknik observasi adalah *obsever* (pengamat) dan orang yang diamati yang kemudian juga berfungsi sebagai pemberi informasi, yaitu informan. Dalam penelitian ini,

observasi digunakan dengan tujuan memperoleh gambaran melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang mengandalkan berkas tertulis bisa dari catatan , buku harian, e-book , surat pribadi dll. Data yang dikumpulkan dengan teknik ini yang ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini data dari dokumentasi didapatkan dengan mempelajari dokumen-dokumen resmi dan arsip-arsip Barenlitbangda Kabupaten Semarang yang berkaitan dengan implementasi program kerja Barenlitbangda. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendukung dan melengkapi data yang terkumpul dari penggalan data yang sebelumnya.

#### **E. Uji Validitas Data**

Validitas berasal dari kata *validity* yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya (Azwar 1986). Selain itu validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti (Cooper dan Schindler, dalam Zulganef, 2006). Dalam mendapatkan keabsahan/validitas data penelitian kualitatif diperlukan adanya teknik pemeriksaan. Menurut Sugiyono (dalam Prastowo,2016) teknik pengujian keabsahan data di dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas data, uji dependabilitas (realibitas) data, uji transferabilitas data dan uji konfirmabilitas data. Dari keempat bentuk itu, uji kredibilitaslah yang paling utama. Untuk menguji

kredibilitas data dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, antara lain perpanjangan pengamatan; peningkatan ketekunan; triangulasi; diskusi dengan teman sejawat dan analisis kasus negatif.

Untuk penelitian ini peneliti menggunakan cara triangulasi sumber. Peneliti membandingkan data dari setiap sumber yang didapat untuk kemudian dibandingkan lalu kemudian melakukan riset kembali. Disini riset yang dilakukan peneliti akan melibatkan data dari dokumen dan hasil wawancara peneliti dengan responden. Menurut Palton dan Moleong, triangulasi dengan sumber dapat dilaksanakan dengan jalan sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu di teliti dengan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

(Lexy J.Moleong, 2002:324)



## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Lexy J.Moleong, 2002:248) Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (Miles dan Huberman, 1992:16), yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data. Peneliti mencari semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan. Pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan serta melakukan pencatatan di lapangan.
2. Reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian data. Langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data (menyajikan data). Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan makin mudah dipahami (Sugiyono, 2009:249). Kemudian Miles dan Huberman (1992:17), menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis, atau teori (Sugiyono, 2009:25).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Penelitian ini menggambarkan situasi dan kondisi nyata yang terjadi di Barenlitbangda Kabupaten Semarang. Gambaran umum yang dideskripsikan adalah pelaksanaan tugas dan program yang dikerjakan oleh semua perangkat kantor Barenlitbangda dan lebih spesifiknya adalah bidang Penelitian dan Pengembangan serta bagaimana sinergitas dari setiap bidang dalam menyelesaikan tugas yang telah diemban. Didalam Barenlitbangda terdapat 4 bidang utama diantaranya :

1. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial
2. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang tersebut diataslah yang akan menjadi penggerak seluruh program kerja yang ada di Barenlitbangda Kabupaten Semarang. Kemudian spesifiknya dalam penelitian ini adalah pada bidang penelitian dan pengembangan. Bidang ini adalah bidang yang cukup penting di Barenlitbangda. Bidang ini mengerjakan penelitian untuk kemudian dikembangkan guna mempercepat laju pembangunan di Kabupaten Semarang. Bidang Litbang juga akan lebih mendalam kepada perihal pengamatan atas semua elemen di Wilayah Kabupaten Semarang. Kepala bidang

akan dibantu oleh sub bidang litbang pemerintahan sosial dan sub bidang ekonomi dan prasarana wilayah.

### **1. Tugas dan fungsi bidang Penelitian dan Pengembangan**

Tugas utama dari Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah menjalankan penelitian dan pengembangan di seluruh wilayah administrasi Kabupaten Semarang. Adapun fungsi dari bidang Litbang adalah sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan
- b) Pengordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang peneliti dan pengembangan
- c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan.

### **2. Sub bidang dan Perincian tugas**

Bidang Litbang memiliki 2 sub bidang yang menopang kerja dari tugas utama bidang Penelitian dan Pengembangan yaitu Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial dan Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah.

#### **a. Sub.bidang Pemerintahan dan Sosial dan Perincian tugas**

Sub bidang pemerintahan dan sosial melaksanakan sebagian tugas di bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan sosial.

Berikut perincian tugas dari subbidang Pemerintahan dan sosial :

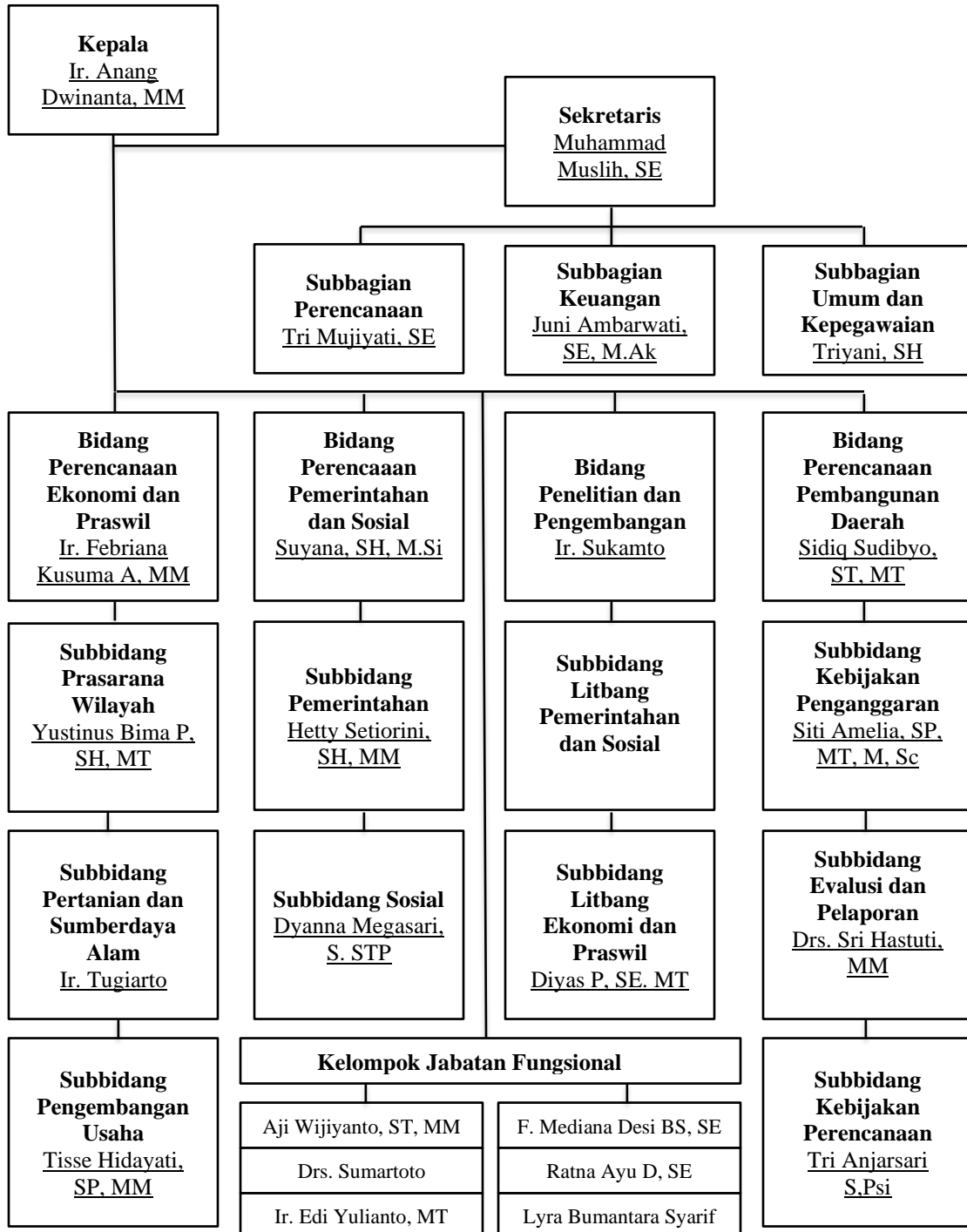
- 1) Menyusun program kerja dan anggaran Sub bidang Litbang Pemerintahan dan sosial
- 2) Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- 3) Menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang penelitian pengembangan dan bidang pemerintahan sosial
- 4) Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial
- 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan sosial
- 6) Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bidang penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial
- 7) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku

**b. Subbidang ekonomi prasarana wilayah dan perincian tugas**

Sub bidang ekonomi prasarana wilayah melaksanakan sebagian tugas Bidang Litbang ekonomi dan prasarana wilayah. Berikut perincian tugas Subbidang penelitian pengembangan Ekonomi dan prasarana wilayah :

- 1) Menyusun program kerja dan anggaran Sub bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana wilayah
- 2) Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- 3) Menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan prasarana wilayah
- 4) Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan prasarana wilayah
- 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub bidang litbang ekonomi dan prasarana wilayah
- 6) Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan sub bidang
- 7) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku

**SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG**



## **B. Hasil Penelitian**

Barenlitbangda adalah SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengerjakan program besar seturut dengan tujuan nasional yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat. Dalam penurunan job desk Barenlitbangda akan mengacu kepada RPJP dan RPJMD. Barenlitbangda dalam skala daerah akan merancang Renstra ( Rencana Strategis) yang akan didetailkan kembali menjadi RKPD ( Rencana Kerja Perangkat Daerah) agar lebih jelas dalam pengimplementasian program kerjanya.

### **1. Proses Perumusan**

Tahapan perumusan adalah tahapan awal didalam sebuah program , undang-undang, kebijakan maupun aturan dibuat. Perumusan diperlukan agar kebijakan yang dibuat adalah benar yang diperlukan dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Perumusan kebijakan atau aturan serta program dalam Barenlitbangda adalah sebuah turunan dari program besar atau program pembangunan nasional yang sudah diputuskan di level pusat sejalan dengan cita-cita bangsa yang menjadi program besar Presiden menjabat. Setelah kebijakan di pusat telah terbentuk maka akan didapati turunan berupa RPJPD (Rumusan Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJMD (Rumusan Pembangunan Jangka Menengah Daerah). RPJPD adalah dokumen perencanaan yang akan menjadi acuan selama 20 tahun lamanya, kemudian lain halnya dengan RPJMD yang merupakan turunan dari RPJPD. RPJMD digunakan sebagai acuan untuk jangka waktu selama 5 tahun lamanya.



Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD selanjutnya akan disepakati bersama menjadi Kebijakan umum APBD (KUA). Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) SKPD sebagai pedoman kepala SKPD terkait menyusun RKA-SKPD berdasarkan nota kesepakatan.

Setelah RKA-SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Setelah aturan yang tersebut diatas sudah menjadi valid dan disahkan maka setiap SKPD akan menentukan kebijakan intern maupun program-program yang akan mereka kerjakan sendiri di jangka waktu yang disepakati bersama. Saat RKPD sudah final serta RKA-DPA selesai disahkan oleh BKUD maka

Barenlitbangda dapat memulai kerjanya mulai dari mengerjakan Urusan, program dan kegiatan.

Barenlitbangda sebagai lembaga perencanaan juga tak lepas dari penggarapan RKA tahun yang akan datang. Barenlitbangda akan mengerjakan RKA dengan Bupati terpilih, DPRD, dan BKUD untuk kemudian disepakati bersama dan disahkan oleh Bupati. Dikarenakan alur proses perencanaan yang panjang maka disetiap tengah tahun pada pengerjaan program maka Barenlitbangda juga sudah diharuskan memulai rancangan untuk perencanaan program dan anggaran untuk tahun kedepannya agar diawal tahun ataupun di awal masa jabatan Kepala Daerah yang baru agenda kerja sudah siap digunakan. Menurut Ibu Yani selaku Sekretaris Sub Bagian Perencanaan, proses perumusan harus dimulai sejak dini sebelum tutup tahun dan agenda lainnya di akhiri. Karena apabila nanti perumusan menunggu agenda lainnya selesai maka tidak akan cukup waktu untuk merumuskan dan mengesahkan sebelum awal tahun dimulai.

*“proses pembuatan RKPD dan lain-lain itu sangat panjang prosesnya, maka dari itu kita di Barenlitbangda biasanya di mid year sudah memulai untuk menyusun anggaran dan beberapa program untuk ditahun 2019 nanti. Terlebih RKA dan DPA harus sudah bisa dipakai di Januari tahun 2019 nanti”*

Secara implementasi proses penerapan program kerja di tahun sekarang akan beririsan dengan penggarapan perencanaan program di setahun kedepannya. Bukan menghentikan proses berjalanya kerja program namun diselipkan beberapa agenda

rapat untuk membahas rencana ditahun depan sebelum program ditahun sekarang ini selesai ditunaikan oleh setiap pelaksana.

## 2. Pembagian Program kedalam 4 Bidang Utama

Divisi bidang dalam Barenlitbangda ada empat dan semua memiliki peran vital masing-masing. Pembagian kedalam bidang yang lebih kecil sangat berguna untuk percepatan eksekusi program nantinya. Selain percepatan, kualitas implementasi sangat diharapkan menunjang sebuah keberhasilan program nasional. Program yang sudah diturunkan dari RKPD akan menjadi beberapa urusan dan kegiatan. Semua itu sudah ditabelkan menurut nama program, anggaran, dan penanggungjawab. Untuk lebih jelasnya peneliti akan melampirkan tabel dibawah sebagai berikut :

**Tabel Rencana Program Barenlitbangda Tahun 2018**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	BIDANG
	Urusan Perencanaan Pembangunan		
1	Program pelayanan Admisitrasi Perkantoran	858.315.000	Sekretariat
	(1) Pengelolaan surat menyurat	9.000.000	
	(2) Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi, sumberdaya air dan listrik	165.000.000	
	(3) penyediaan saja perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor	90.700.000	

	(4) penyediaan logistik kantor	105.496.000	
	(5) Penatausahaan administrasi Keuangan SKPD	44.838.000	
	(6) Penyediaan jasa kebersihan kantor	17.000.000	
	(7) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	211.270.000	
	(8) Penyediaan jasa tenaga pendukung / teknis perkantoran	215.011.000	
2	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	100.000.000	Sekretariat
	(1) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	50.000.000	
	(2) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas	50.000.000	
3	Program peningkatan disiplin Aparatur	7.000.000	Sekretariat
	(1) Pengelolaan administrasi kepegawaian	7.000.000	
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	180.005.000	Sekretariat
	(1) Pendidikan dan pelatihan formal	130.005.000	
	(2) Peningkatan kapasitas jabatan fungsional tertentu	50.000.000	
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	34.000.000	Sekretariat
	(1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	34.000.000	
6	Program perencanaan	28.000.000	Sekretariat & Pemsos
	(1) Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	28.000.000	
7	Program pengembangan data informasi	191.000.000	Sekretariat & pemsos
	(1) Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program kegiatan	16.000.000	
	(2) Sistem Informasi pembangunan daerah	100.000.000	Litbang

	(3) Penyusunan data base kemiskinan	75.000.000	Litbang dan pemsos
8	Program kerjasama pembangunan	145.000.000	Ekopraswil
	(1) Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/ lembaga	145.000.000	
9	Program perencanaan pembangunan daerah	955.000.000	PPD
	(1) Penyusunan rancangan dan penetapan RPJMD	175.000.000	
	(2) Penyusunan RKPD	375.000.000	
	(3) Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban	95.000.000	
	(4) Penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah	170.000.000	
	(5) Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	40.000.000	
	(6) Evaluasi dokumen perencanaan	100.000.000	
10	Program perencanaan pembangunan ekonomi	400.000.000	Ekopraswil
	(1) Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang ekonomi	200.000.000	
	(2) Koordinasi penanggulangan kemiskinan	88.000.000	Pemsos
	(3) Koordinasi pengendalian inflasi daerah	112.000.000	Ekopraswil
11	Program perencanaan pembangunan ekonomi	390.230.000	Pemsos
	(1) koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	320.230.000	
	(2) Koordinasi pendidikan untuk semua	70.000.000	
12	Program perencanaan prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam	100.000.000	Ekopraswil
	(1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pengembangan wilayah	100.000.000	
II	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	463.500.000	
13	Program penelitian dan pengembangan	463.500.000	Litbang

	(1) Koordinasi bidang pengembangan dan penelitian	163.500.000	
	(2) Fasilitasi Kajian dan Riset Daerah	300.000.000	
	URUSAN KESEHATAN	55.000.000	
14	Program perbaikan gizi masyarakat	55.000.000	Pemosos
	(1) penanggulangan KEP anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium , vit A, dan zat mikro lainnya	55.000.000	
	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	57.300.000	
	Program pemberdayaan komunitas perumahan	57.300.000	Ekopraswil
	(1) Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	57.300.000	
	URUSAN KEUANGAN	151.000.000	
	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan Daerah	151.000.000	PPD
	(1) Penyusunan Rencana KUA dan PPAS	151.000.000	
	JUMLAH TOTAL	4.115.350.000	

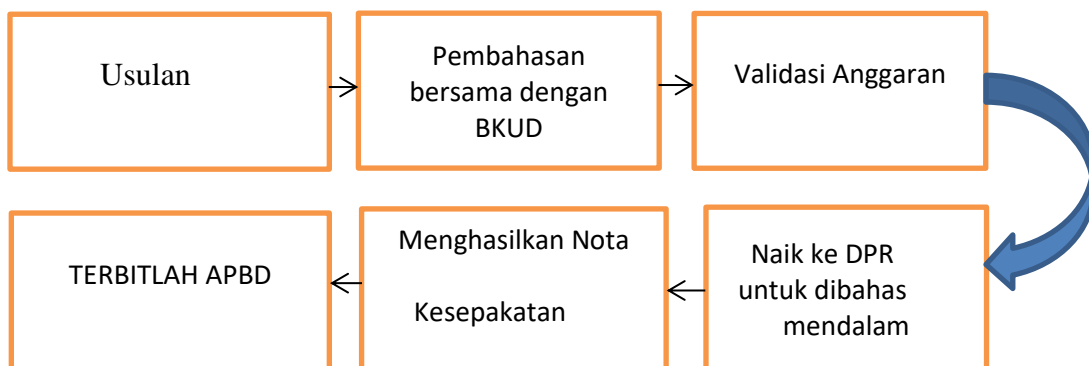
Tabel 3.1 Program Perencanaan Barenlitbangda

Sumber : Berkas LKPJ BARENLITBANGDA 2018

Pembagian tersebut sudah disesuaikan dengan fungsi dan tugas dari divisi bidang masing-masing. Tetapi tidak dipungkiri juga apabila bidang yang sudah diberikan program kerja akan memerlukan bantuan dari bidang divisi lainnya. Perihal irisan program adalah sebuah hal yang biasa dalam setiap penggarapan sebuah program kerja dalam bidang-bidang tersebut diatas. Untuk lebih jelas nya akan dijelaskan sebagai berikut :

**a. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Bidang PPD**

Bidang pertama yang akan dibahas adalah bidang vital atau sebagai jantung Barenlitbanga yaitu Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Bidang PPD didalam program kerja Barenlitbangda tahun 2018 menjalankan 3 program kegiatan. Bidang PPD bertugas sebagai perangkat yang akan mengurus segala aspek berkenaan RPJMD, RKPD, KUA, hingga Rancangan Teknokratik. Didalam bidang PPD akan terbentuk sebuah TAPD (Tim Anggaran Pembangunan Daerah). Tugas TAPD jelas untuk mempersiapkan anggaran dan kepentingan lainnya guna menunjang implementasi program kerja yang sudah disahkan oleh daerah. Untuk alur kerja dari TAPD akan dijelaskan melalui bagan dibawah:



Bagan 3.2 Alur Kerja

*“ Bidang PPD adalah bidang yang bersentuhan langsung dengan proses perencanaan program kerja dan penganggaran. Membuat RPJMD , RKPD , dan KUA adalah kerja pokok selain*

*juga menjalankan fungsi evaluasi dan pelaporan. Evaluasi di bidang PPD juga sangat berdampak bagi keberlangsungan program ,dikarenakan biasanya pada pertengahan implementasi program akan dijumpai beberapa penyesuaian yang dimana itu harus dilakukan perubahan di sisi program kerja maupun RKPD. Dengan begitulah maka ada beberapa naskah seperti RKPD Penetapan dan RKPD Perubahan dihasilkan di tahun itu.”*

Seperti kutipan wawancara dengan Kepala Bidang PPD diatas menjelaskan bahwa alur kerja dari bidang PPD cukup rumit dan panjang prosesnya. Pada umumnya PPD bekerja dengan melibatkan banyak pihak seperti contohnya BKUD untuk penganggaran ataupun Bidang perencanaan DPRD untuk proses Perencanaan. Selain dengan SKPD bidang PPD juga bersentuhan dengan lapisan masyarakat guna mendengarkan usulan langsung dari masyarakat maka dari itu sering diagendakan program Musrenbang yang tidak hanya dilakukan satu kali dalam setahun.

#### **b. Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah**

Bidang selanjutnya yang akan dijelaskan adalah bidang ekonomi prasarana wilayah. Bidang ekopraswil didalam program kerja Barenlitbangda tahun 2018 menjalankan 4 program dan 5 kegiatan. Seperti kutipan wawancara dengan Ibu Febriana selaku Kepala Bidang



Ekopraswil dapat kita simpulkan bahwa Bidang ekopraswil sering mengadakan rapat internal, dikarenakan sebelum berkoordinasi dengan bidang lain yang terkait. Bidang ekopraswil harus sudah memiliki pegangan utama tentang kejelasan mengenai eksekusi program dan prosentase output yang harus dicapai.

*“Untuk penggarapan progja kita biasanya akan berkolaborasi dengan bidang lain. Karna masalah sarana prasarana apalagi ekonomi adalah masalah yang general, bidang ekopraswil pasti akan diajak maupun mengajak diskusi teman-teman lain. Bidang ekopraswil tidak terlalu banyak memiliki program inti yang berat, selebihnya bidang ekopraswil biasanya akan bekerjasama dengan bidang penelitian dan pengembangan untuk melihat serta memastikan bagaimana keadaan validnya kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Semarang tahun 2018.”*

### **c. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial**

Bidang selanjutnya adalah bidang perencanaan pemerintahan dan sosial. Tugas bidang ini sendiri adalah merumuskan, mengkoordinir pelaksanaan serta monitoring pembangunan. Beberapa contoh program yang diemban oleh bidang perencanaan pemerintahan dan sosial adalah program perencanaan pembangunan sosial budaya yang berisikan kegiatan penyusunan data base kemiskinan dan program perencanaan sosial budaya yang berisikan beberapa kegiatan diantaranya koordinasi

perencanaan pembangunan dan koordinasi pendidikan untuk semua (PUS)

*“Bidang perencanaan pemerintahan dan sosial adalah bidang yang juga banyak terkait dengan bidang lain , seperti tercermin pada beberapa program yang kita kerjakan sedikitnya ada satu/dua program yang bersinggungan dan dikerjakan bersama bidang Litbang dan bidang Ekopraswil. Semua itu dikarenakan urusan pemerintahan dan sosial pasti mencakup lapisan masyarakat dari segala jenis ekonomi, latar belakang serta strata di masyarakat daerah.”*

Berdasarkan kutipan wawancara dengan Bapak Yana diatas selaku Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial dapat diketahui bahwa Bidang perencanaan pemerintahan dan sosial bidang yang cukup banyak bersinggungan dengan bidang lain di Barenlitbangda dan bahkan hingga lintas SKPD di Kabupaten Semarang. Oleh karena itu didalam bidang ini akan banyak mengurus jalinan kerjasama, penganggaran bersama, evaluasi beberapa program di ranah sosial dan pemerintahan Kabupaten Semarang. Fungsi yang dijalankan bidang pemerintahan sosial kurang lebih sama dengan fungsi yang dijalankan oleh bidang PPD.

#### **d. Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Bidang penelitian dan pengembangan akan lebih mendalami keranah kajian bagaimana program itu berjalan atau bahkan bisa membuahkan beberapa program baru untuk tahun kedepannya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sukanto bidang litbang akan lebih sering berinteraksi dengan masyarakat, menganalisa dan mencari permasalahan di lapisan terendah masyarakat langsung dari lapangan guna mendapatkan sumber yang jelas dan akurat. Oleh karena itu diperlukan tenaga ahli untuk menganalisis kebutuhan masyarakat agar dapat mempercepat program pembangunan daerah lainnya.

*“Bidang Litbang itu lebih kepada sistem pengkajian dan mengawasi kepada jalanya program , apakah program sudah efisien ataukah bahkan program tersebut tidak membantu sama sekali bagi masyarakat yang dituju. Seperti kala itu ada proyek pengadaan bus lintas sekolah yang sekarang tidak dilanjutkan kembali lantaran dinilai kurang efektif. Karena dirasa dirasa terlalu memakan banyak anggaran sehingga mengganggu anggaran untuk program lainnya maka kita mengadakan peninjauan kembali mengenai masa depa keberlangsungan program tersebut”*

Program yang ada di bidang penelitian dan pengembangan sama saja dengan program di bidang lain, yaitu perpanjangan dari RPJMD 5tahunan. Setelah RKPD disahkan maka akan kita dapati beberapa urusan yang diembankan kepada divisi Litbang untuk kemudian bisa

mengatur jadwal menentukan isi program dan bagaimana output programnya setelah dilakukan implementasi hingga selesai.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Implementasi / pelaksanaan program Penelitian dan Pengembangan Barenlitbangda tahun 2018**

Sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Barenlitbangda harus sejalan dengan Undang Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang isinya menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi Barenlitbangda sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pada tingkat daerah.

Pelaksanaan tugas pokok Barenlitbangda seperti yang dimuat diatas memerlukan serangkaian tahapan sebelum nanti akan sampai pada implementasi program / penerapan program. Rangkaian tahapan dimulai dari tahapan rumusan program hingga menjadi sebuah program atau aturan untuk kemudian dapat diimplementasikan ke masyarakat.

Implementasi program/kebijakan adalah sebuah tahap lanjutan setelah rumusan kebijakan disetujui dan disahkan. Tahapan implementasi di Bidang Litbangakan menjadi pembagian sesuai *jobdesk* yang ada di Bidang Penelitian dan Pengembangan di Barenlitbangda Kabupaten Semarang. Program kerja akan dibagi menjadi beberapa kegiatan, lalu kegiatan tersebut akan diimplementasi

oleh setiap pelaku implementasi seperti contohnya Kepala Bidang dan jajarannya bersinergi dengan SKPD lain dan masyarakat daerah.

Implementasi program kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan ditargetkan harus selalu berhasil dikarenakan apa yang ditangani oleh setiap bidang di Barenlitbangda merupakan turunan dari program nasional. Agar terwujud program nasional yang berhasil dan dapat membantu kemajuan pembangunan bangsa maka diperlukan sinergisitas berkesinambungan dari setiap lapisan mulai dari bawah hingga pusat. Dengan prinsip desentralisasi yang baik serta komunikasi pusat-daerah yang terstruktur maka tidak sukar untuk membentuk sistem pembangunan yang berkesinambungan. Berikut program kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan Barenlitbangda tahun 2018 :

**a. Kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Daerah ( SIPD )**

Kegiatan pengembangan data informasi adalah bagian dari program Pengembangan Data Informasi yang diembankan juga kepada Bidang Pemerintahan dan Sosial dan dibantu divisi Kesekretariatan. Program ini sebenarnya dipimpin oleh divisi Kesekretariatan jadi pada umumnya segala sesuatu yang terjadi saat implementasi program ini hanya akan di diskusikan oleh 3 divisi tersebut. Tidak ada campur tangan pihak ketiga/swasta dalam menjalankan program ini. Untuk susunan proses implementasinya akan dijelaskan dibawah ini:

- 1) Program disahkan dan diberikan kepada Tim pelaksana

- 2) Tim pelaksana membagi tugas untuk mengumpulkan data capaian dari setiap bidang di Barenlitbangda
- 3) Data capaian yang berupa laporan dan bagan akan dikumpulkan di Bidang Litbang untuk kemudian dilakukan *crosscheck* dengan data di lapangan.
- 4) Setelah data valid kemudian akan diberikan kepada Kesekretariatan untuk ditinjau kembali bersama dengan Bidang Pemerintahan dan Sosial
- 5) Data informasi capaian yang sudah ditinjau dan disepakati bersama dengan Tim Pelaksana akan diberikan kepada Pembina Pengawas Muda selaku kepala Barenlitbangda untuk kemudian dipresentasikan saat Rapat Internal Barenlitbangda maupun Musrenbang Wilayah.

Program ini bertujuan untuk memberikan sajian berupa data kongkrit mengenai informasi capaian dari program kerja lainnya yang sudah selesai dilaksanakan guna menentukan target baru di tahun kedepan sembari juga melakukan evaluasi besar yang dilakukan oleh segenap perangkat Barenlitbangda.

**b. Urusan Penelitian dan Pengembangan**

Bidang penelitian dan pengembangan diberikan 2 program kegiatan dalam urusan Penelitian dan Pengembangan. Untuk menjelaskan lebih detailnya adalah sebagai berikut :

**1) Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan.**

Koordinasi ini dilakukan sepanjang masa implementasi program-program bidang lain di keseluruhan Barenlitbangda. Koordinasi ini melibatkan banyak pihak mulai dari kepala BARENLITBANGDA, BKUD, SKPD lain, dan pihak swasta. Setiap urusan kordinasi yang dilakukan Barenlitbangda akan didampingi dan dievaluasi oleh bidang Litbang sehingga akan terwujud kordinasi yang menghasilkan tujuan percepatan dan peningkatan mutu pembangunan Kabupaten Semarang tahun 2018.

**2) Fasilitasi Kajian dan Riset Daerah**

Dalam program kerja ini Bidang Litbang bertanggungjawab menjalankan agenda Kajian yang sudah disepakati di tahun sebelumnya serta melakukan riset untuk memantau apakah program berjalan dengan baik atau bahkan perlu melahirkan ide/program baru yang dirasa perlu untuk dikerjakan di tahun selanjutnya. Didalam program fasilitasi dan riset akan banyak melibatkan berbagai pihak mulai dari Camat , staff

terkait, dan SKPD lainnya. Untuk tahun 2018 Bidang Penelitian dan Pengembangan akan memfasilitasi 3 kajian yaitu penyusunan Sistem Inovasi Daerah ( SIDA ), serta kajian evaluasi pengadaan trayek bus sekolah. Dalam agenda kajian di Program Penelitian dan Pengembangan bidang terkait akan menjadi fasilitator dan mengatur jalannya kajian. Untuk lebih jelasnya bagaimana proses kajian dapat dilihat akan dijelaskan dibawah ini:

- a) Kajian disetujui oleh seluruh perangkat daerah
- b) Bidang litbang menyediakan tempat pertemuan ( Biasanya di BALAI atau di Gedung Serba Guna)
- c) Bidang Litbang melakukan Komunikasi dengan SKPD terkait dan pihak swasta selaku vendor
- d) Bidang Litbang mengatur waktu dan mempersiapkan materi yang akan diangkat dalam kajian ( dari Isu atau Ide gagasan masyarakat)
- e) Dalam kajian tertentu bidang Litbang dapat berperan sebagai Narasumber maupun Moderator seturut Topik yang diangkat dalam kajian.

Dalam hal pembangunan daerah, Bidang Litbang memegang peran yang sangat penting. Bidang Litbang akan menjadi penghubung antara masyarakat dengan



pemerintah sehingga apa yang terjadi di lokasi dan segala yang dibahas di forum besar yang menjadi wadah keresahan masyarakat dapat ditangkap. Setelah mendengar apa yang masyarakat perlukan maka bidang Litbang akan mengadakan rapat internal yang gunanya mempersempit fokus terpenting terlebih dahulu untuk kemudian menyampaikan usulan dan gagasan yang valid dari masyarakat untuk kemudian bersama dengan seluruh bidang divisi Barenlitbangda mengelat agenda Musrenbang. Dalam agenda musrenbang semua hasil kerja dari bidang Penelitian dan Pengembangan serta bidang lain akan didiskusikan dengan jajaran pemerintah daerah lainnya untuk kemudian akan diputuskan program dan wacana untuk merespon suara dan gagasan dari masyarakat.

**Tabel Realisasi Program Barenlitbangda Tahun 2018**

No	Program kegiatan	Keuangan			Realisasi fisik (%)
		Target	Realisasi	%	
<b>I</b>	<b>URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN</b>				
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>858.315.00</b>	<b>818.359.039</b>	<b>95,34</b>	<b>100%</b>
	(1) Pengelolaan surat menyurat,	9.000.000	8.965.000	99,61%	<b>100%</b>
	(2) Penyediaan jasa dan komponen instalasi komunikasi,	165.000.000	131.854.160	79,91 %	100%

	sumber daya air dan listrik,				
	(3) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dan perlengkapan kantor	90.700.000	90.535.000	99,82 %	100%
	(4) Penyediaan logistik kantor,	105.496.000	103.505.400	98,11%	100%
	(5) Penatausahaan administrasi keuangan SKPD	44.838.000	44.063.000	98,27%	100%
	(6) Penyediaan jasa kebersihan kantor	17.000.000	16.999.050	99,99%	100%
	(7) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	211.270.000	208.940.874	98,90%	100%
	(8) Penyediaan jasa tenaga pendukung/teknis perkantoran	215.011.000	213.496.555	99,30%	100%
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100.000.000</b>	<b>98.246.797</b>	<b>98,25 %</b>	<b>100%</b>
	(1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50.000.000	49.618.000	99,24%	100%
	(2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	50.000.000	48.628.797	97,26%	100%
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>7.000.0000</b>	<b>6.899.500</b>	<b>98,56 %</b>	<b>100%</b>
	(1) Pengelolaan administrasi kepegawaian	7.000.000	6.899.500	98,56%	100%
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan</b>	<b>180.005.000</b>	<b>164.587.747</b>	<b>91,44 %</b>	<b>100%</b>

	<b>Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>				
	(1) Pendidikan dan pelatihan formal	<b>130.005.000</b>	<b>119.739.847</b>	<b>92,10 %</b>	<b>100%</b>
	(2) Peningkatan kapasitas jabatan fungsional tertentu	<b>50.000.000</b>	<b>44.847.900</b>	<b>89,70 %</b>	<b>100%</b>
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>34.000.000</b>	<b>33.953.500</b>	<b>99,86 %</b>	<b>100%</b>
	(1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	<b>34.000.000</b>	<b>33.953.500</b>	<b>99,86 %</b>	<b>100%</b>
<b>6</b>	<b>Program Perencanaan</b>	<b>28.000.000</b>	<b>26.110.000</b>	<b>93,25 %</b>	<b>100%</b>
	(1) Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	<b>28.000.000</b>	<b>26.110.000</b>	<b>93,25 %</b>	<b>100%</b>
<b>7</b>	<b>Program Pengembangan Data Informasi</b>	<b>191.000.000</b>	<b>168.239.250</b>	<b>88,08 %</b>	<b>100%</b>
	(1) Pengumpulan updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	<b>16.000.000</b>	<b>14.080.000</b>	<b>88,00 %</b>	<b>100%</b>
	(2) sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)	100.000.000	89.439.250	89,44%	100%
	(3) Pneyusunan database kemiskinan	75.000.000	64.720.000	86,29%	100%
<b>8</b>	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>145.000.000</b>	<b>144.848.000</b>	<b>99,90 %</b>	<b>100%</b>

	(1) Fasilitas kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	145.000.000	144.848.000	99,90%	100%
<b>9</b>	<b>Program perencanaan pembanguna daerah</b>	<b>955.000.000</b>	<b>767.366.750</b>	<b>80%</b>	
	(1) peyusunan rancangan dan penetapan RPJMD	175.000.000	34.020.000	19,44%	20%
	(2) Penyusunan RKPD	375.000.000	369.518.900	98,54%	100%
	(3) Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban	95.000.000	84.856.900	89,32%	100%
	(4) Penyusunan sistem perencanaan pembangun daerah	170.000.000	157.955.450	92,91%	100%
	(5) Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	40.000.000	31.147.000	77,87%	100%
	(6) Evaluasi dokumen perencanaan	100.000.000	88.868.500	89,87%	100%
<b>10</b>	<b>Program Perecnanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>400.000.000</b>	<b>392.762.800</b>	<b>98,19%</b>	<b>100%</b>
	(1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	200.000.000	199.490.800	99,75%	100%
	(2) koordinasi penanggulangan kemiskinan	88.000.000	88.000.000	100%	100%
	(3) koordinasi pengendalian inflasi daerah	112.000.000	105.272.000	93,99%	100%

<b>11</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya</b>	390.230.000	390.230.000	100%	100%
	(1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	320.230.000	230.230.000	100%	100%
	(2) Kooordinasi pendidikan untuk semua (PUS)	70.000.000	70.000.000	100%	100%
<b>12</b>	<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	<b>100.000.000</b>			
	(1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pengembangan wilayah	100.000.000	98.198.727	98,20%	100%
<b>II</b>	<b>URUSAN PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>463.500.000</b>	<b>403.035.236</b>	<b>86,95 %</b>	<b>100%</b>
<b>13</b>	<b>Program Penelitian dan Pengembangan</b>	463.500.000	403.035.236	86,95%	100%
	(1) Koordinasi bidang pengembangan dan penelitian	163.500.000	144.488.618	88,37%	100%
	(2) Fasilitasi kajian dan riset daerah	300.000.000	258.546.618	86,18%	100%
<b>III</b>	<b>URUSAN KESEHATAN</b>	<b>55.000.000</b>	<b>258.546.618</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>14</b>	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	(1) Penanggulangan kurang energi protein (KEP),	55.000.000	55.000.000	100%	100%

	anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya				
<b>IV</b>	<b>URUSAHAN PERUMAHAN RAKYAT</b>	<b>57.300.000</b>	<b>56.827.250</b>	<b>99,17 %</b>	<b>100%</b>
<b>15</b>	<b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>	<b>57.300.000</b>	<b>56.827.250</b>	<b>99,17 %</b>	<b>100%</b>
	(1) Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat	57.300.000	56.827.250	99,17%	100%
<b>V</b>	<b>URUSAN KEUANGAN</b>	<b>151.000.000</b>	<b>143.264.500</b>	<b>94,88 %</b>	<b>100%</b>
<b>16</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>151.000.000</b>	<b>143.264.500</b>	<b>94,88 %</b>	<b>100%</b>
	(1) Penyusunan rencana KUA dan PPAS	151.000.000	143.264.500	94,88%	100%
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>4.115.350.000</b>	<b>3.767.929.096</b>	<b>91,56 %</b>	<b>97,78 %</b>

Tabel 3.2 Program Realisasi Barenlitbangda

Sumber : Berkas LKPJ BARENLITBANGDA 2018

Menurut Sebatier (1986 : 21 - 48) terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan yakni model *top down* dan *bottom up*. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan

model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model top down. Sedangkan gambaran model bottom up dapat dilihat dalam model kelompok dan model kelembagaan. Dalam perihal model implementasi, Barenlitbangda yang dalam hal ini diwakilkan oleh bidang Penelitian dan Pengembangan menggunakan kedua model tersebut sejalan dengan fungsinya sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk pembangunan di level daerah. Bidang Litbang di Barenlitbangda akan berkordinasi dengan daerah dalam hal ini adalah Kecamatan dan Desa , serta akan berkordinasi juga dengan SKPD terkait lainnya apabila memang diperlukan. Terlebih lagi apabila ada program yang memerlukan andil dari pihak swasta, Bidang Litbang Barenlitbangda tetap akan menjalankan fungsinya semaksimal mungkin untuk meraih target-target yang telah ditentukan. Jadi model top dan bottom up biasa digunakan sebagai acaun berhubungan/berkomunikasi.

Secara prosedural Bidang Litbang akan mengimplementasikan semua progjanya dengan tenggat waktu 1 tahun. Namun apabila didalam program kerja yang sudah disepakati tersebut terdapat beberapa programkerja jangka menengah , maka waktu akan dialokasikan sesuai kesepakatan yang sudah dibuat pemerintah pusat.

## **2. Kendala yang dihadapi tahun 2018**

Dalam masa pelaksanaan sebuah program dan kebijakan, Bidang Litbang Barenlitbangda akan menunjukkan beberapa perpaduan dari sejumlah elemen dengan SKPD lainnya. Implementasi sebuah kebijakan akan dipengaruhi dengan situasi dan kondisi yang terjadi selama masa implementasi. Sebuah program saat diimplementasi dapat segera diselesaikan dengan baik dan mencapai target apabila semua kondisi pengerjaan mudah, tepat, dan fleksibel. Sinergisitas dari SKPD dengan masyarakat yang baik juga akan membantu pelaksanaan sebuah program agar lekas selesai.

Namun sebuah program juga tidak selalu baik dalam pengimplementasiannya, beberapa program pasti akan menjumpai faktor yang menghambat pelaksanaannya sebuah program. Menurut Edwards faktor-faktor tersebut adalah :

- a) Komunikasi, jika sebuah program yang telah disusun Barenlitbangda akan melibatkan masyarakat ataupun SKPD lainnya maka komunikasi yang baik akan sangat diperhatikan. Akan menjadi proses yang sangat rumit dan kompleks apabila nantinya komunikasi tidak berjalan dengan baik. Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan



efektif, alur komunikasi dalam implementasi harus terstruktur dan isi informasi ataupun perintah juga sudah seharusnya jelas tersampaikan. Itulah mengapa Bidang Penelitian dan Pengembangan selalu mengadakan rapat intern beberapa kali dalam satu tahun untuk membahas keberlangsungan Renja yang telah disusun awal tahun. Meski upaya rapat intern sudah dilangsungkan beberapa kali, namun sepertinya alokasi waktu yang diberikan untuk membahas seluruh program secara kongkrit tidak terpenuhi dengan baik sehingga masih didapati ada koreksi di beberapa agenda pengerjaan program dikarenakan kurang jelasnya informasi yang diberikan.

- b) Sumber daya, dalam sebuah implementasi sumber daya sangat dibutuhkan guna menunjang keberhasilan program. Sumber daya disini ada 2 macam yaitu sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya anggaran (SDA). Dalam pelaksanaan program yang dilakukan Barenlitbangda, SDM yang akan berurusan adalah seluruh bidang yang ada dengan masyarakat maupun SDM dari SKPD lainya. Apabila terjadi hubungan yang baik diantara ketiganya maka proses implementasi akan dipercepat dengan sendirinya. Secara tidak langsung SDM yang baik dan hubungan yang baik di antaranya akan membantu proses komunikasi dapat berjalan dengan baik dan benar. Bidang

Litbang Barenlitbangda telah diberikan SDA yang cukup dan SDM yang cukup pula, namun untuk beberapa tempo dalam beberapa program didapati pula kekurangan SDM Ahli yang akan menyebabkan percepatan implementasi program terganggu

- c) Standart operating procedures (SOP), SOP menjadi pedoman yang telah dibuat dan disepakati untuk diikuti oleh setiap bidang yang ada di Barenlitbangda tidak terkecuali Bidang Penelitian dan Pengembangan. SOP yang tidak dilaksanakan dan dipatuhi akan menjadi hambatan langsung maupun tidak langsung bagi pengimplementasian sebuah program. Jika saja SOP tidak dipatuhi maka akan menjadi rumit apabila nantinya terjadi sebuah permasalahan. Ketidakpatuhan terhadap SOP dapat menimbulkan kerja ganda atau mengulang dan itu harus dihindari agar waktu kerja efektif dapat terus dicapai tanpa mengganggu progres implementasi program.
- d) Disposisi, adalah sikap dan komitmen dari pelaksanaan terhadap program. Yang dibutuhkan dalam setiap implementasi program adalah komitmen dari setiap pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan di lapangan. Dengan tidak dimilikinya komitmen maka sebuah program akan berjalan diluar harapan dan ekspektasi yang disepakati bersama. Begitu juga dengan sikap

dari setiap pelaksana, sikap bertanggung jawab, responsif dan cekatan menyelesaikan hambatan yang ada akan sangat diperlukan guna membantu pencapaian target sebuah program. Seluruh bidang dalam Barenlitbangda menyadari komitmen itu sangat diperlukan dalam tugas mereka menjalankan Pembangunan Daerah. Agar pembangunan daerah dapat bersinergi dengan baik maka setiap pihak yang terlibat haruslah memiliki komitmen itu dalam diri mereka , supaya apa yang sedang dikerjakan dapat sesuai dengan perencanaan dan penganggaran yang telah disepakati bersama.

Dengan memperhatikan semua aspek yang diuraikan diatas maka proses implementasi akan berjalan dengan baik dan benar. Tingkat keberhasilan program akan berbanding lurus dengan kemampuan Barenlitbangda mengelola dan memanfaatkan semua sumber yang ada. Jika masih didapati hambatan seperti komunikasi yang kurang berjalan efektif serta SDM pelaksana yang tidak terpenuhi dengan baik maka tidak dipungkiri nantinya akan terjadi ketidak berhasilan sebuah program dilaksanakan tahun itu sehingga akan menjadi program tambahan maupun program evaluasi yang akan membebani di tahun yang akan datang nantinya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan studi pustaka dilapangan mengenai implementasi program Penelitian dan Pengembangan BARENLITBANGDA tahun 2018 yang diteliti dapat diketahui bahwa:

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Barenlitbangda Kabupaten Semarang melaksanakan 2 program dan 3 kegiatan. Program penelitian dan pengembangan diisi dengan kegiatan koordinasi bidang dan fasilitasi kajian dan riset daerah. Kemudian program yang kedua adalah program pengembangan data infromasi yang diisi dengan kegiatan Sistem Inovasi Daerah ( SIPD ).
- (2) Hambatan dalam implementasi program Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Semarang adalah kurangnya SDM dan tenaga ahli.Riset mengalami kesulitan pada proses pengumpulan data dari elemen masyarakat. Kesulitan tersebut dikarenakan SDM ( Staff fungsional peneliti) tidak ada di Bidang Litbang, sehingga SDM lainya yang memberikan *backup* walau kurang menguasai materi dikarenakan latar belakang pendidikan yang kurang mumpuni. Kekurangan tersebut akan menimbulkan beberapa hambatan selama pelaksanaan program yang sudah direncanakan.

Selain itu hambatan lain juga didapati pada komunikasi dan interaksi antar pemegang tanggungjawab yang kurang efektif. Dengan tidak efektifnya komunikasi dan interaksi akan membuat proses implementasi tidak berjalan sesuai jadwal dan akan menyebabkan kerancuan tugas di beberapa program nantinya.

## **B. Saran**

Adapun permasalahan yang dihadapi Barenlitbangda pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan di Barenlitbangda pada tahun 2018 antara lain :

1. Terbatasnya kemampuan SDM dalam bidang perencanaan
2. Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan
3. Belum optimalnya koordinasi baik secara internal Barenlitbangda maupun eksternal ( dengan stakeholder)
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil kajian, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan
5. Kurangnya ketersediaan data yang akurat dan belum terpusatnya database yang digunakan sebagai dasar perencanaan
6. Belum konsistennya kebijakan perencanaan dan penganggaran
7. Lemahnya koordinasi antar satuan kerja terkait

Jalan keluar yang dapat diambil oleh Barenlitbangda agar dapat memperbaiki kinerja dan memaksimalkan implementasi program adalah sebagai berikut diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas/mutu SDM dalam bidang perencanaan dengan mengikutsertakan Bimtek, pelatihan ataupun kursus
2. Mengadakan evaluasi dan memberikan saran dan masukan agar penempatan pegawai bisa sesuai dengan latar belakang pendidikan
3. Meningkatkan koordinasi dan membangun komunikasi yang baik secara internal Barenlitbangda maupun eksternal (dengan stakeholder)
4. Lebih mengoptimalkan pemanfaatan hasil kajian, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan
5. Lebih meningkatkan kerjasama dan komitmen yang kuat dengan BPS, kerjasama dengan instansi otonom, kerjasama lembaga pendidikan/LSM, pengumpulan data secara langsung maupun pelibatan masyarakat ataupun lembaga lain agar dihasilkan data yang akurat
6. Meningkatkan komitmen dan loyalitas dalam mewujudkan muatan-muatan perencanaan dan penganggaran
7. Meningkatkan koordinasi antar satuan kerja terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Budiardjo, Miriam. 1995. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: sebagai Instrumen Data Kualitatif*. Depok: Rajagrafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhamad CG. 2013. *Peranan Bappeda dalam pembangunan di Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Fisip Unmul Kalimantan Barat
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Subagyo, dkk. 2016. *Panduan Penulisan Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.

**Jurnal :**

- Agusman H. 2011. *Koordinasi Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Enrekang*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Hassanudin.
- Anwar M.K. 2016. *Fungsi pengkordinasian badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) dalam perencanaan kota Samarinda*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Iskandar, Agus.P.P. 2012. *Peranan badan perencanaan pembangunan daerah dalam menyusun kebijaksanaan dibidang pembangunan di Kabupaten Tanggamus*. Jurnal keadilan progresif volume 3 nomor 1 maret 2012. Lampung : Universitas Terbuka.
- Paat Patrick H. Dkk. 2018. *Ipteks implementasi perencanaan pembangunan daerah berbasis e-planning pada badan perencanaan dan pembangunan daerah (bappeda) Sulawesi Utara*.

**Skripsi :**

- Kt.Sudiarsa .2012 .*Analisis program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda) Kabupaten Buleleng mengenai pengukuran Value for Money*. Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang
- Yudiatno B .2012 .*Peranan Bappeda dalam pembangunan Daerah di Kabupaten Jeneponto* .Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.

## Undang-undang :

- Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- PERMENDAGRI nomor 54 tahun 2010 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Menteri Dalam Negeri. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- PERMENDAGRI nomor 86 TAHUN 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan pembangunan daerah.



## LAMPIRAN



Wawancara dengan Bidang Sekretariat, SUBBAGIAN  
PERENCANAAN Ibu Tri Mujiyati



Agenda Musrenbang



Wawancara dengan Kepala Bidang PPD Bp.Sidiq  
Sudibyo



Rapat Internal Bidang Penelitian dan Pengembangan



Wawancara dengan Kepala Bidang Litbang Bp. Sukamto



Wawancara dengan Kepala Bidang Ekopraswil Ibu  
Febriana

## **Lain – lain**

### **Tugas dan fungsi struktur Organisasi**

Tugas badan perencanaan dan penelitian pengembangan daerah Kabupaten Semarang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**A. Kepala** : Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan

Fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan
- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan
- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perincian tugas:

- a) Merumuskan program kerja dan anggaran Barenlitbangda

- b) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang ekonomi, pemerintahan dan sosial, pengembangan wilayah serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
- c) Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- d) Menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah
- e) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
- f) Menyelenggarakan kesekretariatan Badan
- g) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Badan
- h) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan
- i) Menyampaikan saran dan pertimbangan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku

**B. Sekretariat** : Melaksanakan sebagian tugas Barenlitbangda di bidang penyusunan, perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Fungsi :

- a) Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan rumah tangga Badan
- b) Pengelolaan administrasi keuangan
- c) Pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Badan

Perincian Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran sekretariat berdasarkan rangkuman rencana kegiatan di setiap Sub Bagian
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- c. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja barenlitbangda
- d. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah
- e. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan seluruh bidang di lingkungan Barenlitbangda
- f. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga Barenlitbangda sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas
- g. Mengkoordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Barenlitbangda
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan
- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sekretariat
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku

**C. Sub bagian perencanaan** : Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang penyusunan, perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Perincian Tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Sub Bagian Perencanaan
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan tugas
- c. Menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kerja dan anggaran dari masing-masing Bidang, Sub Bidang dan Sub Bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kegiatandan Anggaran (RKA), Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berdasarkan bahan yang disusun oleh setiap Bidang
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja Badan
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Badan
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan
- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan

- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**D. Sub Bagian Keuangan :** Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang pengelolaan administrasi keuangan Barenlitbangda.

Perincian tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- c. Menyiapkan bahan proses pencarian dana dan pengelolaan administrasi keuangan
- d. Melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan di lingkungan Badan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan badan
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas



- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku

**E. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :** Melaksanakan sebagian tugas

Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian

Perincian tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan urusan administrasi umum, rumah tangga, perpustakaan, kearsipan dan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan
- d. Merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang guna keperluan rumah tangga Badan sesuai dengan kebutuhan, anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Melaksanakan inventarisasi barang kekayaan untuk tertib administrasi serta melaksanakan pemeliharaan barang inventaris agar dapat digunakan dengan optimal
- f. Membuat laporan rutin tentang peremajaan pegawai daftar urut kepangkatan ( DUK), nominatif pegawai dan laporan kepegawaian lainnya demi terciptanya tertib administrasi kepegawaian
- g. Memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, diklat pegawai dan urusan kepegawaian lainnya

- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku

**F. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial**

Melaksanakan sebagian tugas Barenlitbangda di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial
- b. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial

Perincian tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Bidang Pemerintahan dan Sosial
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- c. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang di pemerintahan dan sosial

- d. Mengkoordinasi penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial dengan instansi terkait
- e. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan sosial
- f. Menyusun rancangan akhir perencanaan pembangunan di bidang perencanaan pemerintahan dan sosial
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemerintahan dan Sosial
- h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan dan sosial
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**G. Sub Bidang Pemerintahan :** Melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan dan Sosial di Bidang perencanaan pembangunan pemerintahan.

Perincian Tugas:

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Sub Bidang Pemerintahan
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan

- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan
- d. Menyusun perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan
- e. Melaksanakan konfirmasi data/ bahan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan
- f. Menyiapkan rancangan awal rencana pembangunan di bidang pemerintahan
- g. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan
- h. Menyusun rancangan akhir rencana pembangunan di bidang pemerintahan
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan
- j. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- l. Meyampaikan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundang-undangan

#### **H. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Prasarana Wilayah**

Melaksanakan sebagian Barenlitbangda di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan prasarana wilayah

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan prasaran wilayah
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan prasarana wilayah
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perancangan bidang ekonomi dan prasarana wilayah
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan prasaran wilayah

Perincian tugas:

- a. Menyusun program kerja dan anggaran bidang ekonomi dan prasarana wilayah
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- c. Merumuskan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan prasarana wilayah
- d. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan prasarana wilayah dengan instansi terkait
- e. Menginventarisir permasalahan bidang ekonomi dan prasarana wilayah dan merumuskan langkah-langkah pemecahanya
- f. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan prasarana wilayah
- g. Menyusun rancana akhir perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan prasarana wilayah

- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah
- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan Prasarana wilayah
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**I. Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam :** Melaksanakan sebagian tugas Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah di bidang perencanaan pembangunan pertanian dan sumber daya alam

Perincian tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Sub Bidang Pertanian dan Sumber daya alam
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan bidang pertanian dan sumber daya alam
- d. Menyusun perencanaan pembangunan di bidang pertanian dan sumberdaya alam
- e. Melaksanakan konfirmasi data/bahan/materi penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pertanian

- f. Menyiapkan rancangan awal rencana pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Sumber daya Alam
- g. Menyiapkan bahan musyawarah perencanaan pembangunan di bidang pertanian dan sumber daya alam
- h. Menyusun rancangan akhir rencana pembangunan dibidang pertanian dan sumber daya alam
- i. Menyiapkan bahan perumusan dokumen perencanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam
- k. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya alam
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**J. Sub Bidang Pengembangan Usaha :** Melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi dan Prasarana Wilayah di Bidang perencanaan pembangunan pengembangan usaha

Perincian tugas:

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Sub Bidang Pengembangan Usaha

- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan pengembangan usaha
- d. Menyusun perencanaan pembangunan di bidang pembangunan usaha
- e. Melaksanakan konfirmasi data/nahan/materi penyusunan perencanaan pembangunan usaha
- f. Menyiapkan rancangan awal rencana pembangunan bidang pengembangan usaha
- g. Menyiapkan bahan musyawarah perencanaan pembangunan di bidang pengembangan usaha
- h. Menyusun rancangan akhir rencana pembangunan dibidang pengembangan usaha
- i. Menyiapkan bahan perumusan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pengembangan usaha
- j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang pengembangan usaha
- k. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Usaha
- l. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas



m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku

#### **K. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

Melaksanakan sebagai tugas Barenlitbangda di bidang perencanaan pembangunan daerah (RPJD,RPJMD,RKPD)

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan
- b. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah
- c. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan pembangunan daerah

Perincian Tugas:

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- c. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan daerah
- e. Menyeleenggarakan musyawarah perencanaan peembangunan daerah
- f. Melaksanakan monitoringg dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan , Pengelolaam Data dan Evaluasi
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan keoda atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**L. Sub Bidang Kebijakan Peencanaan** : Melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang kebijakan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD).

Rincian Tugas:

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Sub Bidang Peencanaan Pembangunan Daerah
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahakan pelaksanaan kegiatan
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah
- d. Melaksanakan konfirmasi data/bahan/materi penyusunan perencanaan pembangunan daerah
- e. Menyiapkan rancangan awal rencana pembangunan daerah
- f. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembanguna Daerah
- g. Menyusun rancangan akhir rencana pembangunan daerah
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kebijakan Perencanaan

- i. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kebijakan Perencanaan
- j. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku

**M. Sub Bidang Kebijakan Penganggaran :** Melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Pembangunan di bidang penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penetapan Plafon Anggaran (KUA-PPA).

Perincian Tugas:

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Sub Bidang Kebijakan Penganggaran
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang penyusunan kebijakan umum APBD dan Penetapan Plafon Anggaran (KUA-PPA)
- d. Merekap usulan program dan kegiatan dari SKPD sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

- e. Menyiapkan bahan rapat untuk pembahasan Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS, penetapan dan perubahan dalam rapat di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kebijakan Perencanaan
- g. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kebijakan Perencanaan
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku

**N. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan** : melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Pembangunan di Bidang evaluasi dan pelaporan

Perincian tugas:

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan
- d. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah

- e. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah
- f. Melaksanakan konfirmasi data sebagai bahan penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan daerah
- g. Memfasilitasi evaluasi perencanaan pembangunan daerah
- h. Melaksanakan pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang evaluasi dan Pelaporan
- j. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran tugas
- l. Melaksanankan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku

**O. Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Melaksanakan sebagian tugas Barenlitbangda di bidang penelitian dan pengembangan

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan
- b. Pengordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan

- c. Pelaksanaan monitoring. Evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang penelitian dan pengembangan

Perincian tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- c. Merumuskan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan
- e. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan
- g. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**P. Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Melaksanakan sebagian tugas Barenlitbangda di bidang penelitian dan pengembangan

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang penelitian dan pengembangan

Perincian tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran di bidang penelitian dan pengembangan
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- c. Merumuskan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan pengembangan
- e. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan bidang Penelitian dan pengembangan
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku

**Q. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial :**

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan di bidang penelitian dan pengembangan pemerintah dan sosial

Perincian tugas:

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- c. Menyiapkan bahan kebijakann teknis bidang penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial
- d. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Sosial
- f. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan pengembanagan Pemerintahan dan Sosial
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku



**R. Sub bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana**

**Wilayah** : Melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan di bidang ekonomi dan prasarana wilayah

Perincian tugas :

- a. Menyusun program kerja dan anggaran Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana wilayah
- b. Membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan
- c. Menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan prasarana wilayah
- d. Menyiapkan bahan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan prasarana wilayah
- e. Melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan prasarana wilayah
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
- g. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan tugas

- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku

**S. Kelompok Jabatan Fungsional**

Berdasarkan keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16/KEP/M.PAN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka kreditnya, Jabatan Fungsional Perencana berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis fungsional perencanaan di lingkungan instansi pemerintah.

Tugas pokok Jabatan Fungsional Perencanaan adalah menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan yang meliputi:

- a. Identifikasi permasalahan
- b. Perumusan alternatif
- c. Pengkajian alternatif
- d. Penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan
- e. Pengendalian pelaksanaan
- f. Penilaian hasil pelaksanaan